

KETUA DPRD SUMBAR SUPARDI:

Kuasai Digital, Kuasai Dunia



Ketua DPRD Sumbar, Supardi foto bersama perwakilan tokoh masyarakat, LSM dan Ninik Mamak di Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, Khazanah -- Setelah menerima aspirasi guru-guru SMK dan SMA di Payakumbuh manfaat rees kedua Tahun 2023, Ketua DPRD Sumbar, Supardi melanjutkan kegiatan dengan mengunjungi para tokoh masyarakat, LSM dan Ninik Mamak di Kota Payakumbuh.

Didampingi Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir, Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asta dan Wakil Ketua DPRD Payakumbuh Wulan Demara serta dihadiri oleh tokoh masyarakat, LSM dan Ninik Mamak bertempat di Agam Jua Kafe, Minggu (5/3), Supardi menekankan pentingnya pemahaman tentang teknologi digital.

"Karena segala sesuatu yang dibutuhkan saat ini tersedia dan tersimpan didalam teknologi tersebut," ungkap Supardi.

Sebab, sambungnya, segala sesuatunya saat ini dilakukan secara digital, apakah itu komunikasi, pendidikan, UMKM, semua dengan digital. Maka bagi siapa saat ini yang dapat menguasai digital, maka dia dapat menguasai dunia.

"Karena itu, siapapun dia, apapun jabatannya, setting apa pendidikan, dia akan terdorong dari peradaban yang ada," terang Supardi.

Baru-baru ini diketahui, Ketua DPRD Sumbar dari Partai Gerindra itu juga telah meluncurkan akun

Instagram @supardi.guru yang berguna untuk sarana komunikasi seputar dunia pendidikan.

"Di IG (instagram) ini nanti kita akan saling berbagi tentang masalah pendidikan. Bagaimana pendidikan Sumbar ini dapat maju dan berkembang," pungkask Supardi.

Supardi juga katakan, akun IG @supardi.guru tersebut dibuat bukan untuk hal-hal tertentu, bukan untuk kepentingan politik namun semata hanyalah sebagai sarana komunikasi membahas permasalahan pendidikan.

"Kita ingin dunia pendidikan Sumbar ini bangkit dan maju. Saat ini Sumbar ada diurutan sembilan dari sepuluh provinsi yang ada di Sumatera. Miris sekali, maka

dari itu, melalui akun @supardi.guru ini mari saling berbagi gagasan dan informasi agar pendidikan Sumbar bisa kita tingkatkan," ujar Supardi.

Pada kesempatan itu Supardi juga berislah tentang masa kecilnya yang tak pakai sepatu dan tas pergi ke sekolah. Karena keterbatasan ekonomi keluarga saat itu membuat Supardi harus merasakan pahitnya untuk berjuang menimba ilmu.

"Namun Alhamdulillah, saat ini saya sudah dapat menyelesaikan S1 saya. Hal itu tidak terlepas dari dukungan orang tua, dan lingkungan sekitar yang senantiasa memberikan semangat," kata Supardi mengakhiri. ■ Ili yuniati

UNTUK KATEGORI KBMI 1

Bank Nagari Raih Skor Tertinggi BPD

Padang, Khazanah - Bank Nagari kembali mendulang prestasi bergengsi di awal tahun 2023 dengan berhasil meraih skor tertinggi untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada Kategori Kelompok Bersama berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 (modal Rp1 triliun sampai Rp6 triliun) dari Majalah Infobank.

Dalam kelompok tersebut, Bank Nagari menjadi yang terbaik dengan total skor 96,24 persen. Ini sekaligus menjadi yang tertinggi di antara seluruh BPD dalam rating BUMD, dan berhak mendapatkan predikat The Best.

Direktur Utama (Dirut) Bank Nagari Muhamad Irsyad mengatakan, per September 2021 sampai 2022, Bank Nagari berhasil meraih laba sebesar Rp354,86 miliar atau tumbuh 11,36 persen secara tahunan.

Kenaikan itu ditopang kinerja intermediasi yang tumbuh positif.

"Penyaluran kredit Bank Nagari menembus angka Rp22,04 triliun atau meningkat 6,10 persen," tuturnya.

Sedangkan, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp24,52 triliun atau tumbuh 7,32 persen.

Total aset pun makin mengembang lantaran ada kenaikan 7,9 persen menjadi Rp29,88 triliun.

Irsyad berharap agar segala pencapaian dan prestasi yang berhasil diraih bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan di tahun-tahun ke depan.

"Prestasi ini bisa diraih karena kerja keras seluruh direksi dan karyawan Bank Nagari," tukasnya.

Adapun kriteria dari rating BPD tahun 2023 di antaranya permodalan, kualitas, aset, rentabilitas, likuiditas, dan efisiensi.

Dari kriteria Permodalan, terdapat dua indikator dengan bobot yang berbeda. Pertama, Capital Adequacy Ratio (CAR).

Penghitungan CAR diperoleh dari membandingkan modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang dihitung bank bersangkutan.

Sesuai dengan aturan baku dan dianggap lazim di dunia perbankan, CAR minimal 8 persen dan makin tinggi akan makin baik. Kemudian kriteria kedua adalah kualitas aset.

Ada dua rasio yang digunakan dalam menilai kualitas aset, yakni rasio kredit yang diberikan bermasalah dengan total kredit atau NPL dan rasio kredit UMKM terhadap total kredit.

Selanjutnya, rentabilitas. Acuanannya adalah return on average asset (ROAA) dan return on average equity (ROAE).

Angka ROAA dihitung berdasarkan perbandingan laba sebelum pajak dengan rata-rata aset total dengan standar terbaik 1,5 persen.

Angka ROAE diperoleh dengan membandingkan laba bersih dengan rata-rata modal sendiri dengan standar terbaik 3,5 persen.

Lalu, likuiditas. Patokannya adalah loan to deposit ratio (LDR), pertumbuhan DPK, dan rasio dana murah terhadap DPK.

Angka LDR diperoleh dari membandingkan kredit yang diberikan dengan seluruh dana yang berhasil dihimpun.

Standar terbaik LDR yaitu 78 persen sampai dengan di atas 100 persen untuk bank dengan CAR sama atau di atas 14 persen dan 78 persen sampai dengan 92 persen untuk CAR di bawah 14 persen. Terakhir Efisiensi.

Indikator efisiensi yang digunakan yaitu Net Interest Margin dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BO/PO).

Kalkulasi NIM didapat dari membandingkan pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif. ■ ist

Pasbar Siap Jalankan Program Desa Berbasis Usaha Perikanan

Simpang Empat, Khazanah - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, siap menjalankan program smart fisheries village (SFV) untuk memperkuat kemandirian desa berbasis usaha perikanan di Pantai Sikabau, Kecamatan Koto Balingka.

"Mudah-mudahan kita siap karena program ini hanya ada tiga di Provinsi Sumbar dan salah satunya di Pasaman Barat," kata Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto usai menerima kunjungan rombongan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pasaman Barat, Senin (6/3).

Ia berharap wilayah yang diusulkan itu bisa lolos dan program terlaksana di Pasaman Barat.

"Tim Pembek Pasaman Barat akan saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk mewujudkan itu semua. Kami siap untuk menerima kritikan dan saran dari tim peninjauan lapangan, sehingga ada perbaikan dan akhirnya lolos

menjadi SFV," tegasnya.

Kepala Dinas Perikanan Pasaman Barat Zulfii Agus mengatakan SFV bertujuan untuk menjadikan suatu desa menjadi desa mandiri dengan melibatkan beberapa sektor. Lokasi yang diusulkan ini nantinya akan menjadi desa perikanan cerdas.

Menurutnya, program itu didanai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selama tiga tahun sesuai kesepakatan antara Bupati Pasaman Barat dengan kementerian.

"Untuk tahun 2023, ini dikucurkan anggaran sebanyak Rp500 juta untuk kegiatan pelatihan terkait perikanan, pariwisata, selam, transplantasi karang dan media informasi dan komunikasi," katanya.

Ia menyebutkan muaranya nanti desa tersebut akan mandiri dan tentunya akan menciptakan mata pencarian tambahan bagi masyarakat sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Direncanakan pada tanggal



Pembek Pasaman Barat saat menyambut tim Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka untuk menjalankan program smart fisheries village (SFV) di Pasaman Barat

Selanjutnya, nanti sampai pendampingan untuk hilirnya produk yang dibuat masyarakat serta juga kegiatan pengelolaan mangrove.

"Akhirnya, nanti menjadikan desa itu jadi desa mandiri berbasis teknologi informasi dalam pengembangan perikanan dan wisata," ujarnya.

Ia berharap kerja sama antarorganisasi perangkat daerah (OPD) terkait sangat diperlukan karena banyak melibatkan sektor lain selain perikanan.

Sementara itu, Kepala UPT Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan Nia Naelul Haxanah Ridwan mengharapkan kerja sama Pembek Pasaman Barat dalam mewujudkan program itu.

Menurutnya, potensi dan produksi yang diperoleh timnya pada kegiatan SFV ini berjalan baik.

Ia menyebutkan tim SFV akan langsung menuju lokasi yang diusulkan Pembek Pasaman Barat yaitu Pantai Sikabau, Kecamatan Koto Balingka.

Setelah pertemuan tersebut, tim dari LRSDKP KKP melakukan peninjauan lebih lanjut ke lokasi yang diusulkan. ■ ant

FOKUS PERBAIKAN EKONOMI NELAYAN

H. M. Nurnas Siap untuk Terus Perjuangkan Aspirasi

Parit Malintang -- Memanfaatkan masa reses kali ini HM. Nurnas terus bergerak menemui konstituennya, dimulai dari hari Jumat (4/3/2023), sampai Minggu (5/3/2023). fokus pada masyarakat nelayan, dimulai dari Katapiang, terus ke Pasia Sunua dan terakhir di Sungai Limau, yang acaranya di Pasia Baru, Pilubang Sungai Limau, kabupaten Padang Pariaman, hari berikut nya baru menemui para kelompok tani.

Sewaktu kunjungan terakhir untuk para nelayan di masa reses, Nurnas sambil menyerap aspirasi juga melaporkan untuk Kec. Sungai Limau sudah diberikan bantuan mesin tempel 15 PK, sebanyak 12 unit untuk dipergunakan nelayan melaut, dan untuk tahun 2023 juga Longtail 13 PK untuk nelayan di Lohong.

Dalam acara pertemuan tersebut, para nelayan sangat berharap agar ada penambahan bantuan lainnya, seperti yang diterima daerah lain, baik alat tangkap maupun pendukungnya.

"Terimakasih banyak bantuan dan perjuangan pak Nurnas untuk kami, tapi kami berharap bapak sering-sering melihat kami, dan untuk besok kami juga mohon bapak perjuangan alat bantu lainnya, syukur-syukur dapat tambahan mesin, semoga bapak selalu sehat," tutur ajo Bilal

mewakili teman-temannya.

Menyikapi permintaan dan rasa bahagia masyarakat nelayan tersebut, HM. Nurnas mengatakan, akan selalu memperjuangkan penambahan anggaran yang bisa diberikan pada nelayan, guna meningkatkan hasil tangkap, dan bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Saya merasa bersyukur bisa berjuang untuk membantu masyarakat nelayan dan lainnya, Insya Allah untuk tahun anggaran 2024 mendatang, akan saya masukkan lagi dalam pembahasan, sehingga semakin banyak yang dapat terbantu dan berusaha dalam meningkatkan ekonominya termasuk diusahakan untuk Wanita Nelayan, dengan demikian bisa menjamin pendidikan dan kesehatan meningkat pula," tegas Nurnas di hadapan masyarakat, Minggu (5/3/2023).

Nurnas juga mengatakan, reses kali ini fokus utamanya adalah nelayan, karena pertanian sudah lebih 70% dibantu namun begitu saya akan menemui para petani juga di sisa waktu reses masa sidang kedua ini paparnya.

"Masih ada satu kali penganggaran tahun 2024 dalam memperjuangkan masyarakat, maka kita fokus kan saat ini pada nelayan, karena targetnya menyamakan dengan kelompok tani," pungkasnya. ■ jerrel



Anggota DPRD Sumbar H. M. Nurnas sedang menjawab pertanyaan salah seorang warga



LAKSANAKAN RESES JARING ASPIRASI

65 Anggota DPRD Sumbar Serentak Turun ke Dapil



Padang, Khazanah – Sejak tanggal 1 Maret 2023 lalu, 65 anggota DPRD Sumbar turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menjangkau aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam rangkaian Reses Masa Sidang Kedua Tahun 2022/2023. Berbagai keluhan dan aspirasi disampaikan masyarakat yang dikunjungi kepada anggota dewan.

Banyak isu penting yang disorot anggota DPRD Sumbar saat memanfaatkan masa reses perorangan tersebut ketika mengunjungi konstituen di dapil masing-masing seperti masalah pendidikan terutama menyangkut zonasi, parahnya infrastruktur di daerah yang dikunjungi anggota dewan bersangkutan, masalah pembangunan akhlak, kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan para nelayan serta petani dan lain-lain.

Seperti disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi saat melaksanakan agenda reses perorangan di Kota Payakumbuh, Minggu (5/3) bahwa tahun 2023 ini masih melalui pokrimya akan kembali dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) lanjutan untuk guru-guru di Kota Payakumbuh. Khusus untuk guru-guru SMK, ia menganggarkan kegiatan sebanyak Rp3,7 miliar, sehingga dengan anggaran yang cukup besar tadi diharapkan ada out put jelas dari apa yang dilaksanakan.

"Kita berharap setelah mengikuti bimtek ada perbedaan kemampuan dan kecerdasan guru-guru SMK di Kota Payakumbuh dibanding guru-guru SMK lainnya di Sumbar. Jika tidak, tak ada gunanya diadakan bimtek ini,"

kata Supardi.

Dan dalam masa reses ini, ulasanya, adalah masa di mana anggota DPRD bekerja di luar gedung atau di luar kantor dengan melakukan kunjungan ke konstituen atau Daerah Pemilihan (Dapil) untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat menjangkau aspirasi menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

"Reses sangat efektif dan digunakan menjadi instrumen yang baik untuk memperoleh aspirasi dan masukan dari konstituen, serta untuk melihat langsung implementasi berbagai kebijakan yang dibuat oleh eksekutif.

"Itu berarti reses dilakukan dalam kerangka anggota DPRD menjalankan tugasnya dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan," tukasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib saat melakukan reses ke Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg) Kota Padang, Rabu (2/3) menemukan adanya ketimpangan dalam penyebaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta persoalan zonasi sekolah yang dinilai masih menunjukkan rasa berkeadilan, masih menjadi keluhan cukup menonjol dari masyarakat yang diketujujnginya.

"Akibatnya, dalam kondisi ekonomi sulit seperti sekarang, anak-anak di Kampung Baru Nan XX terpaksa menyambung pendidikan ke sekolah swasta," katanya.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa penyebaran bantuan PKH juga mengalami ketimpangan,



Ketua DPRD Sumbar Supardi (tengah) didampingi Kabag Persidangan, Zardi Syahrir saat menampung aspirasi guru-guru di Payakumbuh.

dimana ada masyarakat yang sangat membutuhkan tidak tersentuh bantuan dari pemerintah pusat itu, sehingga basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu diperbarui.

"Jadi kondisinya terbalik, masyarakat mampu sekolah di negeri sementara yang kurang mampu melanjutkan pendidikan di swasta. Ironisnya, penyebaran bantuan PKH juga mengalami kondisi yang sama," katanya.

Dia berharap, keluhan masyarakat harus dicarikan solusi secara bersama-sama, sekarang ekonomi sulit dan dunia kerja pun banyak terjadi PHK.

"Kondisi ini diperburuk pula dengan tingginya harga bahan pokok di pasaran, dan hal ini jelas merugikan pekerjaan rumah pemerintah daerah," tegasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi V, Hj. Aida, SH saat melaksanakan reses di Nagari

Galuga Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, mendapati adanya satu dari 4 jorong di Nagari tersebut, tidak ada memiliki satupun bidan desa, yakni Jorong Tanjung Jajaran.

"Bisa kita bayangkan, bagaimana jika salah seorang warga Tanjung Jajaran itu tiba-tiba sakit atau hendak melahirkan. Jujur saja, kalau Aida tak bisa membayangkannya," jelas Aida sambil menyeka air matanya dengan sapu tangan.

Sementara H. M. Nurnas saat melaksanakan reses Pasia Katapiang, Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (4/3) melaporkan, sejak tahun 2019 sampai 2022 pihaknya telah memperjuangkan aspirasi nelayan untuk alat tangkap berupa Mesin Tempel 15 PK sejumlah 152 unit, ukuran 40 PK sejumlah 153 unit,

Longtail 13 PK sejumlah 59 unit, Fhis Box 100 ltr sejumlah 256 buah, Gilnet 97 Set.

"Sebelum kita menjemput aspirasi masyarakat di Dapil 2 (Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman) dalam rangka reses, tentu harus melaporkan dulu apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya," ujar H. M. Nurnas.

Selanjutnya, untuk tahun 2023 sudah disediakan lagi Mesin Tempel 15 PK sejumlah 53 unit, Mesin Tempel 40 PK 16 unit dan Longtail 34 unit semua itu untuk Nelayan mulai dari Pasia Katapiang, Pasia Tiram Ullakan, Pasia Sumua, Marunggi, Taluk, Pauh, Nareh sampai ke Sungai Limau," ujar H. M. Nurnas yang hobi makan gulai kepala ikan ini.

Sedangkan Syamsul Bahri saat reses ke Nagari Maha Karya, Kecamatan Lubuk Nan Duo, kabupaten Pasaman Barat (Pasbar),

Sabtu (4/3), masyarakat setempat sangat berharap adanya perbaikan serta pembuatan jalan dan jembatan di daerah mereka.

Menjawab hal itu, Syamsul Bahri dengan tegas mengatakan, wajib untuk membangun dan memperbaiki jalan dan jembatan tersebut melalui anggaran APBD Provinsi, juga anggaran Kabupaten serta Anggaran DAK.

Dikatakan, permintaan masyarakat untuk infrastruktur jalan dan jembatan bukan tidak berlasan, karena sangat dibutuhkan dalam perputaran ekonomi masyarakat, khususnya dalam mengangkut hasil pertanian, perkebunan, jasa peternakan tersebut.

Dia juga mengatakan, jika perekonomian meningkat, maka bisa untuk membiayai anak sekolah dan lainnya, sehingga kualitas masyarakat juga semakin hari kian meningkat dan maju. ■ adv



Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib saat menampung aspirasi masyarakat Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung (Lubeg) Kota Padang.



Warga Nagari Galuga, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota sedang serius mendengarkan paparan yang disampaikan Hj. Aida.



4. Anggota DPRD Sumbar H. M. Nurnas sedang menjawab pertanyaan salah seorang nelayan saat reses ke Pasia Katapiang, Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (4/3).



Anggota DPRD Sumbar, Syamsul Bahri saat menjemput aspirasi masyarakat di Nagari Maha Karya, kecamatan Lubuk Nan Duo, kabupaten Pasaman Barat, Sabtu malam (4/3).

KADAI SIPATU

Second Branded

2nd STORE

MANANG DI GAYA - MANENGGANG DI SAKU

JL. M. HATTA, PASAR BARU, PAUH (0852-6339-4326)

KHAZANAH

MAU PASANG IKLAN ?

Hubungi :

0751-8952449

HP/WA :

081363400050

08126777345



TOKO MAS MURNI

Pasar Raya Limau Tanah Pari Padang Telp. 0851-08410

BERHIAS - MENABUNG & VALUTA ASING

- 1. Dikirimkan Langsung dari Pabrik Perhiasan
- 2. Layanan Memotong dan
- 3. Menawarkan berbagai jenis Valuta Asing

ONE STOP SERVICE

Pasar Perhiasan & Permafa Berkualitas

KPID Diminta Awasi Lembaga Penyiaran

Padang, Khazanah-- Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Suwipen Suib meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) agar melakukan pengawasan terhadap netralitas lembaga penyiaran di daerah itu jelang Pemilu 2024.

"KPID Sumbar memiliki pekerjaan yang cukup berat yakni dalam mengawasi netralitas tayangan jelang Pemilihan Umum 2024 menjaga agar TV dan radio ini tetap dapat melakukan siaran secara cerdas, netral, terhadap Pemilu 2024," kata dia di Padang, Senin.

Menurut dia ini penting untuk dicermati mengingat apabila di titik

mundur, pemilihan umum hanya tinggal hitungan 11 bulan lagi.

"Ini tahun politik, tahun yang penuh tantangan bagi semua pihak terutama teman-teman di industri penyiaran. Jadi KPID harus dapat mengawasi netralitas tayangan," tutur dia.

Dirinya berharap adanya batasan batasan terkait dengan iklan partai politik yang saat ini menghiasi layar televisi, ada beberapa partai politik yang juga memiliki media dengan masif lembaga penyiaran menyiarkan hal tersebut secara berulang ulang. "Saya melihat tidak ada keadilan

di sini, KPID Melalui KPI pusat hendaknya bisa membuat regulasi yang jelas akan iklan politik tersebut," ucapnya.

Selain itu komisioner KPID Sumbar juga mengemban tugas perihal digitalisasi penyiaran yang disertai dengan masifnya berbagai konten, menyusul perkembangan transformasi digital di segala bidang.

DRPD Sumbar menekankan pula pentingnya tugas dan fungsi KPID agar lebih inovatif, adaptif, lincah dalam membunikan program-program strategis pengawasan siaran.

"Dan penguatan pemirsas dalam hal

ini literasi juga sosialisasi penyiaran yang sehat bagi masyarakat," ujarnya.

Ia juga mengingatkan tugas yang selalu melekat pada KPI dalam mengawasi konten-konten siaran berupa kekerasan termasuk melakukan kampanye anti kekerasan seksual yang tidak menutup gender manapun karena saat ini hal hal tersebut sangat marak terjadi di Sumatera Barat.

Sementara Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sumbar Ficky Tri Saputra berjanji akan segera berkonsultasi dengan KPI Pusat terkait hal hal yang menjadi perhatian dari DPRD Sumbar.

Ia mengakui monopoli iklan kampanye di beberapa lembaga penyiaran sangat kentak sekali dilakukan oleh salah satu partai politik. "Apakah itu melanggar atau tidaknya, KPID Sumbar akan segera berkoordinasi dengan KPI Pusat," imbuh dia.

Dirinya berterima kasih atas masukan dan pandangan pandangan yang di berikan oleh DPRD Sumbar terkait kinerja di depan di tahun tahun politik yang saat ini telah dimulai.

"KPID Sumbar dipastikan, tidak akan terbagi pilih kepada setiap lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan dan tidak netral nantinya," kata dia. Jern/nt

KPU Tetap Lanjutkan Tahapan Pemilu

Makassar, Khazanah-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia meminta seluruh jajaran penyelenggara Pemilu di daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota tetap melanjutkan tahapan Pemilu serentak 14 Februari 2024, menyusul proses banding terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sedang berjalan.

"Rekan-rekan penyelenggara di daerah tentu tidak terpengaruh sama sekali putusan PN tersebut, karena sudah ditegaskan Ketua KPU RI akan melakukan banding," ujar anggota KPU RI Idham Holid saat dikonfirmasi wartawan dari Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Meskipun PN Jakarta Pusat memutuskan Partai Prima berkaitan putusan perdata terhadap tergugat KPU RI untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024, kata dia, seluruh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota tetap menjalankan proses tahapan.

"Karena seluruh tahapan pemilu dilaksanakan tepat waktu dan tepat aturan," ujar Idham membimbing Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI ini menekankan.

Idham menjelaskan, sengketa proses dalam tahapan penyelenggara pemilu itu memang diatur dalam Undang-undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 khususnya di pasal 466 sampai dengan pasal 472.

Bahkan di dalam bab mengenai sengketa proses dalam Undang-undang tersebut, kata dia, ada pasal yang secara eksplisit, menegaskan lembaga apa yang berwenang menangani, menyelesaikan, dan memutuskan.

"Sengketa proses pemilu yaitu di pasal 467 ayat 1 dan pasal 470 ayat 1 Undang-undang Pemilu

Lembaga tersebut adalah Bawaslu dan PTUN. Undang-undang Pemilu tidak menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa proses," papar pria kelahiran 2 Maret 1977 ini menambahkan.

Menurutnya, sebagaimana penyampaian Ketua KPU RI Hasyim Asyari melalui konferensi pers bahwa tahapan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Karena, penyelenggaraan Pemilu setiap lima tahun, tidak sekelekar di Undang-undang Pemilu pada pasal 167 ayat 1, tetapi juga amanah konstitusi yang termaktub dalam pasal 22 huruf e, ayat 1 UUD



SELURUH jajaran penyelenggara Pemilu di daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota, diminta untuk tetap melanjutkan tahapan Pemilu serentak 14 Februari 2023, meski saat ini tengah berlangsung proses banding terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. DOK

1945. "Perlu kami ditegaskan bahwa Undang-undang Pemilu tidak mengenal yang namanya penundaan pemilu. Di dalam Undang-undang Pemilu itu hanya ada dua istilah, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan," ucap mantan Ketua KPU Kabupaten Bekasi dua periode ini menegaskan.

Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan perdata Partai Prima nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024.

Gugatan itu diajukan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Prima Agus Priyono dan Sekretaris Jenderal Dewan DPP Prima Domingus Oktavianus Tobu Kiik selaku pihak penggugat terhadap KPU yang diwakili oleh Ketua Umum KPU Hasyim Asyari sebagai tergugat.

Presiden Dukung KPU Ajukan Banding

Bandung, Khazanah-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memutuskan agar KPU tidak melaksanakan atau menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding," kata Jokowi saat usai melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin.

Dia pun menegaskan pemerintah telah berkomitmen agar tahapan Pemilu 2024 terlaksana dengan baik. Sehingga ia pun berharap tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai dengan rencana.

"Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik, tahapan Pemilu kita harapkan tetap berjalan," kata dia. Sebelumnya, PN Jakarta Pusat pada Kamis (2/3), mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam putusan-nya, yakni untuk memilhikan serta terciptanya keadaan yang adil, serta melindungi agar sedini mungkin tidak terjadi lagi kejadian-kejadian lain akibat kesalahan ketidaktepatan, ketidaktepatan, ketidakefektifan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan oleh tergugat, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), majelis hakim memerintahkan kepada KPU untuk tidak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024.

Selain itu, majelis hakim juga menyatakan bahwa fakta-fakta hukum telah membuktikan terjadi kondisi error pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang disebabkan faktor kualitas alat yang digunakan atau faktor di luar prasarana.

Dengan demikian, secara otomatis, PN Jakarta Pusat pun memerintahkan untuk menunda pemilihan umum yang sebelumnya telah dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024.

KPU RI pun pada Senin, juga sedang menyiapkan berkas pengajuan banding atau menerima salinan putusan PN Jakarta Pusat Jakpus tersebut. rjn/ant

6 DPC Demokrat Berketua Baru

Padang, Khazanah-- DPD Partai Demokrat Sumatera Barat (Sumbar) telah selesai menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Demokrat serentak Gelombang Ke-II untuk enam daerah yakni Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman, Solok, Pesisir Selatan dan Tanah Datar.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar, Mulyadi dalam keterangan tertulis di Padang, Minggu mengatakan Muscab tersebut menghasilkan enam nama Ketua DPC terpilih yang disusulkan oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) di masing-masing daerah.

Meski telah dipilih sebagai pimpinan cabang dan Muscab, mereka tidak otomatis definitif dilantik sebagai Ketua DPC di masing-masing daerah tersebut.

Ia menjelaskan para ketua DPC yang terpilih melalui usulan itu akan menjalani uji kelayakan dan kepatuhan atau fit and proper test dengan Tim 5 Demokrat yang di dalamnya juga ada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Nanti akan diputuskan oleh Tim 5 yang di dalamnya ada Ketua Umum," katanya.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Barat menyatakan penyelenggaraan Muscab ini bukan persoalan menang atau kalah namun ajang konsolidasi dan regenerasi kepemimpinan. Dirinya berharap, jika kelak para Ketua DPC terpilih ini dilantik, mereka harus betul-betul berjuang untuk membesarkan Partai Demokrat.

"Berjuang itu mendahulukan kepentingan partai dari pada kepentingan pribadi," katanya.

Muscab serentak gelombang kedua untuk Kabupaten Padang Pariaman, Januar Bakhti terpilih sebagai Ketua DPC dan di Kabupaten Solok terpilih Imaul Koto. Kemudian DPC Pesaman Barat terpilih Sabar AS sebagai Ketua dan Kota Padang Surya Jufri Bitel terpilih sebagai Ketua serya Jamalul Yatim terpilih sebagai Ketua DPC Pesisir Selatan. rjn/ant

Proporsional Tertutup Jaga Murah Partai Politik

Jakarta, Khazanah-- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya tetap konsisten dengan sikap mendukung sistem pemilihan proporsional tertutup demi menjaga murah partai politik dalam proses pemilu di Indonesia.

"Dengan sistem proporsional tertutup, maka ada tanggung jawab partai politik untuk wajib mendidik dan menyiapkan kader sebagai calon pemimpin bangsa," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Polemik soal sistem pemilu anggota legislatif antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup masih menjadi materi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hasto memastikan bahwa PDI Perjuangan mendorong sistem pemilihan proporsional tertutup karena hal itu terkait dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dia mengatakan setiap partai politik harus mempersiapkan dengan benar para calon anggota



SISTEM pemilihan proporsional tertutup yang terus digagalkan dan dipertahankan PDIP, diakui sebagai sebuah upaya untuk tetap menjaga murah partai politik dalam proses pemilu di Indonesia. DOK

legislatif yang memiliki tugas besar dalam hal fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi representasi.

"Proses kaderisasi di internal partai adalah tugas partai yang sangat penting bagi masa depan," tambahnya.

Seluruh anggota dewan memiliki komitmen menyelesaikan masalah rakyat

kamera, kemudian mengabdikan kegiatannya, tapi melupakan substansinya. Sehingga, politik hanya ditampilkan untuk meningkatkan popularitas semata dengan berbagai cara," katanya.

Dia mencontohkan fenomena di mana ketika terjadi bencana. Semua politikus hadir hanya untuk menunjukkan bahwa dia telah berbuat, tapi tak mencari akar persoalan dan mencegah masalah serupa terjadi lagi dengan mengedepankan mitigasi bencana, pengaturan tata ruang, dan lain sebagainya.

"Demokrasi elektoral yang didasarkan pada proporsional terbuka itu juga berbiaya tinggi. Basisnya individu, sementara (proporsional tertutup) gotong royong," imbuhnya.

Dengan basis individu tersebut, lanjutnya, maka hasil pemilihan proporsional tertutup akan mendorong praktik nepotisme yang makin marak.

Dengan sistem proporsional tertutup itu pula, menurut dia, suatu partai melupakan proses kaderisasi hanya demi

mendapatkan kursi di parlemen, mencalonkan keluarga pejabat, atau kemudian mendapatkan popularitas semata. Padahal, itulah tugas partai yang sangat penting bagi masa depan.

"Itulah yang disikapi, sehingga meskipun PDI Perjuangan terkesan menentang arus, tapi kami berkeyakinan bahwa proporsional tertutup adalah jawaban," tegasnya.

Bagi Hasto, partai politik yang menang "membajak" kader maupun mempromosikan kader lain sebagai jabatan pintas, maka tidak akan setuju dengan sistem pemilihan proporsional tertutup.

"Sehingga, mari kembalikan kepada murah partai dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi pemerintahan," kata Hasto.

Namun demikian, dia mengakui sistem pemilihan proporsional tertutup juga memiliki kelemahan, yakni terkait adanya keputusan elitis di mana hanya pimpinan partai yang menjadi penentu.

"Soal ini, ya partai harus bertanggung jawab karena

menempatkan kader-kadernya di peringkat satu, dua, dan tiga. Itu harus diumumkan ke publik sebagai akuntabilitas dan memastikan demokratisasi di internal partai berjalan baik," jelasnya.

Terkait proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Hasto mengaku pihaknya yakin pada akhirnya MK akan mengambil keputusan tepat. Dia percaya dalam mengambil keputusan MK bersikap independen, merdeka, dan tak masuk dalam kepentingan praktis.

Dia berharap para hakim MK memiliki jiwa dan sikap kenegarawanan agar mengambil keputusan terbaik, mengingat peserta pemilu berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah partai politik, bukan perorangan.

"Jalur orang per orang itu sudah dibuka melalui jalur DPD, yang seharusnya ke sana. Kalau jalur partai itu jalur kolektif, sehingga partai akan kokoh pada ideologi, platform, sesuai jati dirinya berpertai," ujar Hasto

Kristiyanto. rjn/ant